

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dari suatu negara yang telah diatur di dalam Undang - Undang setiap negara, istilah Ibu Kota Negara digunakan dalam pembahasan mengenai ibu kota negara yang baru. IKN digunakan sebagai istilah dalam berbagai pembahasan mulai dari perencanaan pembangunan pemindahan ibu kota baru hingga munculnya Rancangan Undang-Undang IKN baru mengenai konstitusi yang akan digunakan di ibu kota baru. Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke area Kalimantan dengan diberi nama Nusantara. IKN dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas suatu Negara, namun Ibukota diciptakan sebagai representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep *forest city, smart, modern, and green city*. (Mutaqin et al., 2021) Ibukota diciptakan menggunakan energy terbarukan, sehingga IKN tidak bergantung pada energi fosil, ungkap Presiden Jokowi dalam pidatonya tanggal 26 Agustus 2019.

Mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur lebih tepatnya di Desa Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kawasan ini termasuk kawasan yang akan digunakan sebagai wilayah IKN. Luas wilayah yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang akan digunakan sebagai ibu kota negara yaitu sekitar 180.965 hektar dan kawasan Ibu Kota ini termasuk pulau terbesar ke 3 di dunia. Bukan hanya pulau terbesar namun Kalimantan merupakan rumah bagi keragaman hayati, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pulau ini memiliki hutan yang

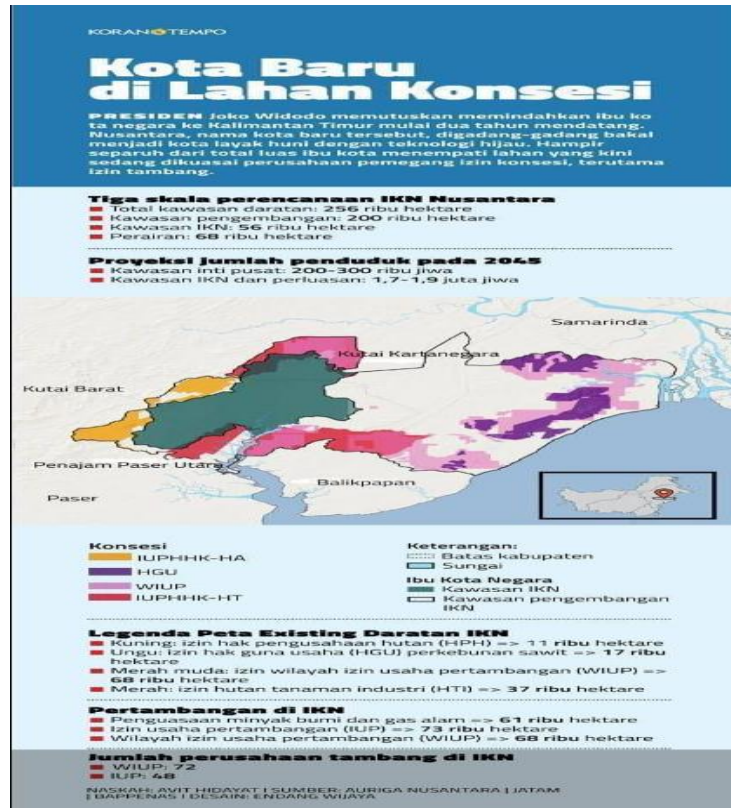
luasnya sekitar 29% di Indonesia. Tidak hanya itu sistem ekologi Kalimantan bergantung satu sama lain, karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari tumpukan endapan organik. Presiden Jokowi dalam pidatonya memperkuat rencananya mengenai pemindahan IKN, ia mengatakan bahwasannya transportasi air di Kalimantan cenderung lebih aktif daripada di Jawa yang memungkinkan dalam pembangunan industrialisasi berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur ini merupakan program pemerintah dalam upaya pemerataan perekonomian penduduk agar tidak adanya kesenjangan antara masyarakat Jawa dan masyarakat Kalimantan. Wilayah IKN juga memiliki potensi besar dalam sektor perekonomian salah satunya dari perkebunan kelapa sawit dan industri. Potensi yang dimiliki Kalimantan akan mendorong masuknya investor untuk menanam saham di wilayah IKN, sehingga upaya ini dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Alasan lain pemilihan Kalimantan sebagai IKN, karena keadaan geografis Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Negara Indonesia. Adanya pemindahan Ibu kota ini juga memberikan keuntungan bagi wilayah Sepaku dan sekitarnya, karena nantinya proses pembangunan akan membuat daerah tersebut lebih maju dari segi infrastruktur, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. (Nugroho, 2020)

BAPPENAS membedakan tempat untuk Ibu kota negara ini secara sederhana dan mengategorikan wilayah tersebut melalui tiga ring cakupan wilayah, yang mana ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai kawasan inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai kawasan IKN, terakhir ring ketiga seluas 180.965 hektar yang disebut pemerintah sebagai kawasan total. Namun, kawasan yang akan dijadikan sebagai IKN bukan ruang kosong melainkan kawasan lahan konsesi, yang terdiri dari 162 tambang, kehutanan, PLTU batubara, dan perkebunan sawit. Terdapat pula 94 lubang bekas tambang batu bara, berbagai polemik ini menjadi pertimbangan berbagai pihak dalam rencana pemindahan IKN.

Gambar 1. 1

Poster IKN berada di atas Lahan Konsesi



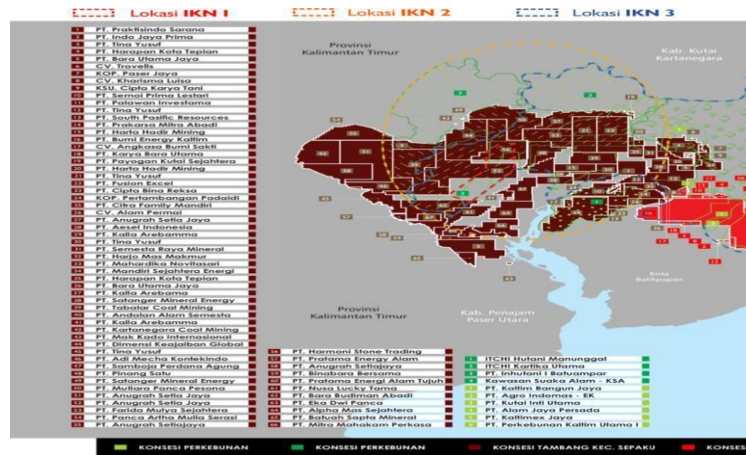
Sumber : Forest Watch-Walhi 2021-Ibu Kota Baru Buat Siapa

Sebelum ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, di beberapa wilayah di Sepaku sudah tergolong sensitif terhadap kerusakan ekologisnya sekitar (18%-27%) kondisinya sudah banyak sekali yang mengalami kerusakan. Permasalahan ini terjadi karena banyak perusahaan-perusahaan ilegal yang membuka lahan, kemudian lahan tersebut diganti dengan lahan sawit. Tidak hanya itu tambang-tambang ilegal sudah banyak sekali yang masuk ke daerah Sepaku sebelum adanya pemindahan Ibu Kota Baru ini ditetapkan. Bahkan rencana ring satu IKN tepat berada diatas ekosistem mangrove primer yang mana area ini merupakan lahan konservasi, harus kita ingat bahwasannya merusak ekosistem mangrove merupakan pelanggaran terhadap

Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 mengenai Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Gambar 1. 2

Peta RING 1, 2,dan 3 IKN Berada Di Zona Merah Lahan Konsesi



Sumber : Forest Watch-Walhi 2021-Ibu Kota Baru Buat Siapa

Pemberitaan di media sosial mengenai pemindahan IKN kini ramai diperbincangkan, hampir seluruh kalangan masyarakat membahas isu tersebut. Isu ibu kota baru terlanjur ramai diperbincangkan oleh masyarakat, mengenai berbagai polemiknya seperti perangkat undang-undangnya yang belum ada, begitu pula masalah mengenai filosofi konsep kotanya. Masyarakat juga mempertimbangkan berbagai persoalan mengenai masalah ekonomi, politik, pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik, maupun ketahanan dan keamanan negara Indonesia. Bahkan kecurigaan oligarki politik dalam mega proyek pemindahan IKN ini juga menjadi perbincangan masyarakat, proyek ini dicurigai menguntungkan beberapa penguasa lahan di Kalimantan.(Dr. Moeldoko, 2019)

BAPPENAS memperhitungkan kira- kira ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasarkan desain dari pembangunan IKN, yaitu sekitar 466 Triliun dan 323 Triliun. Rencana

pemindahan Ibu Kota Baru ini diusung dengan cara tukar menukar kawasan hutan pada calon area IKN dengan menukar area hutan produksi dan hutan ini belum dibebani oleh izin pemanfaatan. Mengenai tukar menukar kawasan hutan hal ini merupakan sebuah mekanisme yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015, peraturan ini merupakan peraturan pengganti PP sebelumnya yaitu nomor 60 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Berbagai macam perbedaan pendapat masyarakat akan kekhawatirannya pada Rancangan Undang-undang yang mengatur IKN mengenai apakah cukup sebuah kewenangan diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan ini tertuang dalam Pasal 11 RUU IKN yaitu, mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata pemerintahan khusus IKN diatur dalam peraturan presiden. Bagaimana mungkin wewenang sedemikian besar atas sebuah otoritas IKN diberikan atas dasar peraturan presiden. Sedangkan, UU yang ada di atasnya yaitu RUU IKN ini tidak mengatur dengan rigid kewenangannya. Jelas terlihat bahwa kewenangan dilakukan berdasarkan atribusi dan pelimpahan kewenangan.

Demikian pula saat terjadi bencana atau dampak buruk dari sebuah pembangunan belum dikaji secara maksimal, bilamana pengkajian dilakukan namun belum maksimal maka akan terjadi dampak buruk yang lebih besar. RUU masih bersifat teknis jika dibandingkan dengan kondisi sosiologis masyarakat bahkan jika dibandingkan dengan teknokratik proyek pemindahan IKN itu sendiri, maka dari itu pandangan konteks legal *drafting* pada RUU IKN ini masih harus dibahas lebih mendalam dengan memfasilitasi problematika yang ada di masyarakat. Terkait hal tukar menukar kawasan hutan juga akan menimbulkan berbagai permasalahan konflik sosial yang berkelanjutan di kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik tersebut terjadi pada area yang akan

dikeluarkan dari kawasan hutan maupun pada sektor wilayah yang akan dijadikan sebagai lahan penggantinya.

Potensi semakin menipisnya hutan di Kalimantan juga terlihat pada pembangunan Bendungan baru yang akan dibuat oleh Hashim Djojohadikusumo, berdasarkan hitung-hitungan konsultannya, kata Hashim, suplai air bersih untuk Balikpapan dan industri sekitarnya itu membutuhkan setidaknya USD 300 juta hingga USD 330 juta atau setara Rp 4,7 triliun (kurs dolar 14.389). Dari situ akhirnya mereka berencana untuk memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur agar mereka bisa punya peran untuk membantu memasok air bersih yang saat ini masih terbatas. Melihat pernyataan tersebut kemungkinan besar akan terjadi konflik baru, berkaca dari konflik bendungan Wadas yang sampai kini juga menjadi persoalan yang merugikan masyarakatnya.

Kearifan lokal pastinya akan terdampak karena adanya perpindahan ibu kota negara, masalah mengenai pergeseran masyarakat adat menuju masyarakat yang lebih modern juga nantinya terjadi. Semakin terbukanya masyarakat adat asli daerah tersebut, mereka kemungkinan akan mengalami pergeseran *culturenya*. Seperti teori modernisasi yang dilakukan oleh Huntington, bahwasannya modernisasi lebih bersifat *revolusioner*, sebagai bentuk pendorong perubahan sosial yang cepat dan kehidupan modern tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Perubahan modernisasi tidak memungkiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat asli Kalimantan yang bergeser menjadi masyarakat modern. Maka dari itu semakin banyaknya masyarakat yang meninggalkan budaya asli Kalimantan akan berpengaruh pada menipisnya budaya di Indonesia.

Salah satu warga suku asli Penajam Paser Utara mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, hal itu diungkapkan di tengah ramai liputan kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Ungkap Dahlia salah satu warga Sepaku mengatakan "Di zaman

sekarang saja kami sudah kesusahan mencari pekerjaan, apalagi nanti, lebih susah lagi, bagaimana cara kami membiayai anak kami sekolah. Anak-anak saya mau seperti apa. Mau tinggal di mana?”. Masyarakat adat juga menyebut bahwa patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara sebagai perkebunan turun temurun. Sementara, Kepala Suku Adat Paser Balik, Sibukdin memperkirakan di Kecamatan Sepaku – lokasi IKN Nusantara terdapat sekitar 5000 – 6000 hektar lahan nenek moyang, yang belum mendapat sertifikat kepemilikan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan mengenai potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara. Masyarakat berharap sebelum pembangunan ibu kota negara benar-benar dimulai, urusan kepemilikan lahan tersebut diperjelas dengan berharap pemerintah memberikan surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat.

Bahkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, pakar ekonomi Faisal Basri, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hingga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mereka menjadi inisiator petisi penolakan IKN, tercatat sudah hampir 18 ribu yang menandatangani petisi tersebut. Melalui situs [change.org](https://www.change.org) mereka mendatangi petisi yang berisi anggapan mengenai proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Bahkan cenderung hanya menguntungkan segelintir orang saja, karena ini mereka menganggap pemindahan ibu kota negara merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut. Bahkan salah satu masyarakat mengatakan di situs [change.org](https://www.change.org) "tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan besar publik

adalah benarkah kepentingan pemindahan ibukota baru adalah untuk kepentingan publik?" tulis di petisi tersebut.(Surbakti, 2019)

Berbagai pro dan kontra di masyarakat menimbulkan kontroversi bahkan pertentangan yang terjadi baik di dunia maya maupun di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penelitian dalam mengkaji perbedaan perspektif mengenai rencana pemindahan IKN ini. Pemilihan penelitian dilakukan di Desa Sepaku karena desa ini merupakan wilayah bagian dari IKN baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Sepaku dan pemerintah setempat mengenai perpindahan IKN ini, sehingga kita mengetahui perspektif masyarakat dan pemerintah daerah setempat terkait pendapatnya atas kerisauan yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia apakah sejalan dengan yang terjadi pada kehidupan mereka. Melihat dari berbagai kontroversi ini, maka penulis mengangkat judul penelitian “Respons Masyarakat Kecamatan Sepaku Terhadap Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah, bagaimana respon masyarakat dan pemerintah Penajam Paser Utara mengenai perpindahan Ibu kota baru di Penajam Paser Utara ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat serta pemerintah Penajam Paser Utara mengenai perpindahan ibu kota baru di Penajam Paser utara, serta mengetahui bagaimana persiapan Pemerintah Penajam Paser Utara untuk menghadapi berbagai dampak dan kontroversi perpindahan ibu kota baru.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi atau sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek dari proses pembangunan ibu kota baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama mengenai persiapan perpindahan ibu kota baru. Hasil penelitian tersebut juga diharapkan bisa memberikan masukan dalam pelaksanaan pemerintah untuk menghadapi situasi di ibu kota baru. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi peneliti lainya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga yang berkaitan mengenai kontroversi masyarakat mengenai perpindahan ibu kota negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis mampu menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu perpindahan ibu kota negara. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program-program baru di pemerintahan ibu kota baru. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai isu perpindahan ibu kota baru sehingga masyarakat mendapatkan perspektif baru mengenai masalah perpindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara.

1.5 Kajian pustaka (Literatur Riview)

Penelitian yang dilakukan Muhammad Irhas Ilmawan pada tahun 2020 mengenai analisis isi pemberitaan mengenai Ibu Kota Negara, penelitian ini membahas ini mengenai rencana

pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang penetapan informasi mengenai rencana pemindahan ini dikatakan oleh presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo bersama para menternya ketika rapat terbatas berlangsung di kantor Presiden. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mendapatkan 10 kategori mengenai rencana pemindahan IKN, masing- masing kategori tersebut yakni mengenai : dampak sosial yang dihasilkan dari pemindahan IKN tersebut dan seberapa pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat utamanya masyarakat sekitar calon IKN, dampak ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat seluruh Indonesia, kajian mengenai wilayah pemindahan bakal calon IKN, dukungan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara sehingga dapat mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat atau bahkan untuk mengetahui ada masyarakat yang pro maupun kontra dalam pemindahan ini, pendanaan dalam pemindahan IKN ini karena sorotan yang utama pastinya pada segi pendanaan yang tergolong cukup fantastis karena memakan banyak modal dalam membangun kota baru, perizinan dalam pemindahan sehingga dapat diketahui perihal pemindahan ini agar tidak asal- asalan dipindah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riki Mardiansyah pada tahun 2021 ini mengenai pemindahan IKN menurut politisi di Palembang memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan politisi di Kota Palembang mengenai rencana pemindahan Ibu Kota baru ke Penajam Paser Utara, selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu informasi tentang konsep terbaik yang akan diadopsi oleh pemerintah, sehingga dalam rencana pemindahan ini tidak merugikan berbagai kalangan. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu pemerintah pusat karena hal ini pemerintah pusat lah yang memiliki peran terpenting dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan publik, sehingga dalam melakukan penelitian ini peran politisi sebagai sumber data primer sedangkan politisi di

Palembang yang akan diwawancara langsung dan data sekunder dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel dan berita yang membahas mengenai perpindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur ini. Masalah- masalah yang sering terjadi di Jakarta antara lain mengenai keadaan Jakarta yang ramai padat penduduk, masalah bencana banjir yang sering terjadi, kualitas udara yang buruk karena polusi udara sehingga udara di Jakarta tidak sehat, macet di berbagai sudut di Jakarta, krisis air bersih karena Jakarta yang tidak memiliki daerah resapan air yang bagus, dan terakhir mengenai potensi ancaman gempa bumi di Jawa karena potensi gempa Di pulau jawa sangat tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faidah (2020) mengenai analisis wacana isu pemindahan Ibu Kota Negara pada program TV “Indonesia *Lawyers Club*”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai isu Pemindahan Ibu Kota Negara dengan objek kajian di program Indonesia *Lawyers Club* TVOne, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis wacana Van Dijk yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui struktur wacana pada program Indonesia *Lawyers Club* TVOne pada episode "Perluah Ibukota Dipindahkan". Tujuan lain penelitian ini juga untuk mengetahui isu pemindahan Ibukota Negara yang diwacanakan pada Program Indonesia *Lawyers Club* TVOne pada episode "Perluah Ibukota Dipindahkan" ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data- data yang lebih akurat dengan analisis data beserta sumber- sumbernya, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dikonstruksikan dengan mengundang kedua belah pihak yaitu pihak yang pro dengan wacana pemindahan Ibukota dan pihak yang kontra terhadap isu yang diwacanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang dikemukakannya pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Implikasi pada penelitian ini yaitu dengan diadakannya program Indonesia *Lawyers Club* diharapkan dapat melahirkan insan yang kritis terhadap gejala yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini

juga dikemukakan bahwasannya isi materi yang lebih berkualitas dan tidak hanya sekedar berdebat dengan narasumber lain namun lebih mengarah kritik yang mampu membangun karakter manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rozak (2020) tentang kajian yuridis pemindahan IKN. Penelitian ini membahas mengenai rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, yang mana daerah ini merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Pada dasarnya Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik dalam mengatur Ibukota Negara, secara konstitusional peran Presiden dalam sistem ketatanegaraan tidak memiliki peran untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Presiden tidak bisa menetapkan secara sepihak, serta tidak dapat memutuskan secara sepihak saja. Banyak sekali aspek yang mendorong Presiden untuk melakukan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, hal ini dilakukan dengan alasan Jakarta yang menjadi pusat segala aspek kehidupan di Indonesia terlalu tumpang tindih dengan daerah lain di Indonesia dan Jakarta juga telah mengalami berbagai permasalahan baik masalah sosial maupun alamnya. Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat kehidupan masyarakat Indonesia seperti hiburan, jasa, perdagangan, keuangan, olahraga, penelitian, transportasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Merah Johansyah, Pradarma Rupang, Tommy Apriando, Zamzami, Hilda Meutia, Ahmad Saini, Zenzi Suhadi, Ahmad Asnov Birry, Marina Nasution, Yuyun Indradi, dan Anggi Putra Prayoga pada tahun 2021, dalam bukunya yang berjudul "Ibukota Baru Buat Siapa?". Buku ini membahas mengenai berbagai isu dan kontroversi mengenai rencana pemindahan ibukota baru. Mengangkat berbagai problematika pertimbangan berbagai ancaman yang akan datang bilamana ibukota benar akan dipindah. Buku ini juga membahas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara memakan dana sekitar Rp 118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI. Masalah mengenai udara yang

kurang bersih, masalah mengenai transportasi, masalah mengenai air bersih yang tidak memadai, serta masalah kepadatan penduduk yang mana hal ini mengenai besarnya resiko bencana untuk Jakarta dibandingkan dengan Kalimantan lebih tinggi Jakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya Yulianti, Rizki Firmansyah, dan Sri Sundari (2020) mengenai analisis potensi sektor unggulan di Kalimantan dalam mempersiapkan ibu kota baru. Penelitian ini juga membahas tentang masalah yang terkait dengan pengelolaan sektor unggulan dalam konsep ekonomi pertahanan, hal ini berdasar pada pemanfaatan sektor unggulan perekonomian yang merupakan bagian dari sumber daya nasional sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menciptakan stabilitas keamanan serta memperkuat pertahanan Negara maka hal ini berupaya dalam membuat sektor baru yang unggul dalam menghadapi rencana pemindahan IKN ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aufa Hanum Salsabila, dan Nunung Nurwati (2020), penelitian ini mengkaji mengenai upaya dalam peningkatan deforestasi besar-besaran karena potensi migrasi penduduk yang masih akan terjadi karena adanya interaksi ekonomi dengan penduduk setempat yang akan melakukan ekspansi lahan untuk pertanian, serta kegiatan berburu dan menangkap ikan yang menggunakan api sebagai salah satu keperluannya. Sehingga perlu peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) yakni perencanaan dan kebijakan sosial di mana pemerintah perlu membuat kebijakan penghijauan kembali bersama masyarakat (*Community Restoration Policies*) serta pemberdayaan masyarakat melalui *Locality Development*. Penelitian ini dibuat melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial

dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat akan membahas pengaruh potensi migrasi penduduk yang masif pada peningkatan deforestasi terkait rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur. Potensi perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalimantan tentunya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutaqin D, Muslim M, dan Rahayu N pada tahun 2021 ini dilakukan dalam menganalisis konsep *forest city* yang dicanangkan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Baru di Kalimantan mengingat Kalimantan yang alamnya masih terjaga dan hutan di Kalimantan merupakan *supply* paru- paru dunia. Bilamana pemindahan ini dilakukan tanpa mengkaji dan menganalisis mengenai kondisi hutan dan alam di Kalimantan maka berbagai permasalahan mengenai kerusakan alam akan terjadi, banyak ekosistem yang akan terusik kehidupannya. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Suparko pada tahun 2020, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan beserta prinsipnya. Dalam melaksanakan pembangunan adapun beberapa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan yaitu berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan lingkungan, dan berkelanjutan sosial yang mana dari ketiga poin ini harus berkembang secara seimbang. Bilamana ketiganya tidak bisa berjalan seimbang maka pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan.

Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani pada tahun 2017, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan yaitu dalam mengimplementasikan atau menerapkan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas konsep umum tentang pelaksanaan kebijakan publik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi- dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi: *evaluasi ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post* atas pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi: *evaluasi ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Merujuk pada penelitian terdahulu ini bahwasannya berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara yang mana upaya pemindahan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk kegiatan transformasi ekonomi dalam mengurangi kesenjangan wilayah antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Pemerintah dalam hal ini memilih kawasan yang bisa mendorong pembangunan di wilayah timur dan kondisi Kalimantan yang berada di tengah- tengah Indonesia. Beberapa masyarakat maupun tokoh publik ada yang beranggapan bahwasannya persiapan pemindahan ini dilakukan oleh pemerintah dinilai belum maksimal persiapannya, mengingat dalam memindahkan pusat pemerintahan itu tidak

mudah pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena pemerintah dirasa kurang terbuka terhadap opini masyarakat mengenai isu- isu tersebut. Masyarakat juga berharap mengenai kelestarian hutan di Kalimantan tetap terjaga kelestariannya, hal ini berkaitan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dibangun guna melengkapi fasilitas sarana dan prasarana ibu kota.

Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami laksanakan yaitu mengenai tempat penelitian yaitu di Penajam Paser Utara, utamanya dengan masyarakat Desa Sepaku. Penelitian terdahulu melihat dari segi masyarakat Indonesia atau dari segi masyarakat secara keseluruhan, fokus kajian penelitian ini pada pemerintah daerah yaitu bagian pekerjaan umum, bagian tata ruang kota, pemerintah desa atau perwakilan daerah, untuk mengetahui dari segi pemerintahan ini bagaimana dan dari segi masyarakat daerah Sepaku apakah dirugikan atau diuntungkan dari rencana pemindahan IKN tersebut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Pengertian Kontroversi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan tindakan perdebatan, pertikaian, atau persengketaan sehingga menimbulkan kegencaran. Pengertian kontroversi secara umum merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan suatu perbuatan atau perbedaan sikap yang berupa perdebatan mengenai sebuah masalah dan masalah tersebut menghasilkan dua sisi yang bertentangan sehingga dapat menghasilkan konflik. Proses umum terjadinya sebuah kontroversi ialah perbuatan manusia atau tingkah laku manusia. (Silalahi, 2019a)

Contravention atau kontroversi merupakan suatu motif proses sosial yang berada diantara persaingan dengan konflik, kontroversi ditandai dengan gejala- gejala adanya ketidakpastian

mengenai diri sendiri seseorang atau suatu *planning*. Contoh tindakan yang menimbulkan kontroversi yakni sebuah penolakan, kegiatan yang menghalang- halangi, keengganan setiap individu, kegiatan protes atau tidak setuju dalam sebuah tindakan yang dilakukan manusia, serta segala perbuatan yang dapat mengacaukan rencana pihak lain atau lawan dengan bentuk perlawanan atau kekerasan. Dalam bentuknya kontroversi dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Bentuk kontravensi yang sederhana

Bentuk kontroversi sederhana merupakan sebuah tindakan sederhana yang mudah kita temui di lingkungan sekitar kita, misalnya seperti memaki orang lain, memfitnah orang lain tanpa sebab, mencerca atau menyangkal pendapat orang lain, dan memelmpar sebuah bukti kepada orang lain.

b. Bentuk kontravensi yang intensif

Bentuk kontroversi intensif seperti ini merupakan sebuah tindakan yang tergolong cukup besar pengaruhnya, misalnya menyebarkan desas- desus hal ini melibatkan banyak orang sehingga mampu menggiring opini publik ke arah yang ramai, contoh lainnya yakni mengecewakan pihak lain atau menghasut pihak satu untuk membenci pihak lawannya atau masyarakat lainnya. Kontroversi intensif ini bersifat rahasia dengan ditandai sifat yang berkhianat atau dengan menyebarkan rahasia orang lain. Kontroversi ini juga memiliki sifat yang taktis, misalnya suatu tindakan yang membingungkan atau mengganggu kubu lain dengan cara mengejutkan versi lainnya.

Kontroversi merupakan suatu proses yang mana proses sosial ini berada pada tengah-tengah antara persaingan dengan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam sebuah kontroversi ditandai dengan gejala seperti dengan adanya tindakan ketidakpastian mengenai seseorang, misalnya menyebarkan kebencian sehingga muncul keraguan terhadap seseorang atau

orang lain. Kebencian dan keraguan tersebut menimbulkan kontroversi pada sekelompok masyarakat. Kontroversi itu sendiri tertuju mengenai keyakinan, serta pandangan pikiran manusia terhadap rencana yang dikemukakan seseorang atau sekelompok masyarakat. (Silalahi, 2019b)

Kontroversi kebijakan publik mengarah pada perbedaan individu yang memicu adanya sebuah polemik, perbedaan tersebut akan menghasilkan kontroversi yang menggemparkan masyarakat. Teori perbedaan tentang individu dalam dunia psikologi yang dikembangkan oleh Lindgren (1980) yaitu bahwasannya merupakan sebuah perbedaan individual yang menyangkut mengenai variasi sebuah proses terjadinya sebuah fenomena, baik variasi dalam aspek fisik dan juga psikologis, perbedaan tersebut juga disatukan dalam sebuah teori yang dikemukakan oleh Chaplin. Chaplin mengatakan bahwa sembarang dari sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang dapat membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Menurut Wushu Hendrikus, menyatakan bahwa kontroversi merupakan adu argumentasi, hal ini dilakukan secara individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai sebuah kemenangan satu pihak.

Kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk membuat kebijakan dan kinerjanya.

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah. Sedangkan, menurut Anderson kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah. Efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia. Komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik. Kebijakan (*Policy Future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyesuaian terhadap suatu masalah kebijakan; Aksi kebijakan (*Policy Action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai; Hasil kebijakan (*Policy Outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak dapat secara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan-tindakan sedang berjalan juga tidak semua konsekuensi tindakan yang teramati diinginkan atau terantisipasi; Kinerja kebijakan (*Policy Performance*) merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

Teori pertentangan *Discrepancy Theory*, yang menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan yang mencerminkan penimbangan dua nilai yaitu pertentangan yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan seorang individu dengan apa yang ia terima, dan pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Kontroversi dalam konteks kegiatan argumentasi memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan orang lain. Penyebab dari hal ini yaitu adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Kontroversi terjadi secara alami didalam kehidupan bermasyarakat.

Unsur- unsur pembentuk kontroversi terdiri dari, adanya masalah atau topik yang diangkat di dalamnya, adanya tim afirmatif, tim negatif atau tim kontra, pihak yang netral, moderator, dan penulis atau notulen. Tujuan dari adanya kontroversi yakni membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen, mengetahui kasus yang tengah terjadi, melatih argumentasi berdasarkan data yang kuat, dan mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sejalan dengan argumen. Kontroversi terjadi dari dua sudut pandang yaitu pihak afirmatif dan sudut pandang pihak negative.

Fungsi dari kontroversi dalam kehidupan masyarakat yakni merupakan sebuah cara untuk membangun sebuah keterampilan dalam berbicara untuk mengemukakan sebuah pendapat dengan cara yang baik terhadap konflik yang pro maupun kontra. Dalam membangun daya analitis kontroversi juga memiliki peran yang mana dengan adanya kontroversi kemampuan seseorang dalam membaca maupun dalam memahami sebuah kasus menjadi lebih mudah. Kontroversi juga dapat membangun kemampuan seseorang dalam mengungkapkan pendapat secara logis dengan gestur atau sikap dengan bahasa yang santun sehingga tidak menyinggung orang lain dalam mengungkapkan sebuah pendapat. Selain itu peran dari kontroversi dapat membantu seseorang dalam merangsang manusia untuk berpikir kritis dan dapat membantu menilai dalam mengklarifikasi pendapat orang lain dalam menangani isu- isu yang terjadi. Maka dari inilah peran dari kontroversi yang terjadi dalam masyarakat menjadi sebuah kontradiktif karena bukan hanya memiliki dampak buruk melainkan juga memiliki peran yang baik jika dimanfaatkan dengan baik.

1.6.2 Teori Politik Lingkungan

Politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari

individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan (Peterson, 2000: Bryant, 1992: Vayda, 1983: Blaikie dan Brookfield, 1987; Abe Ken-ichi, 2003; dan sebagainya). Herman Hidayat mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem. Konsep ini telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti “Dunia-Ketiga Politik Lingkungan”, politik lingkungan boleh didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Pemahaman terkini politik lingkungan adalah cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan atas suatu susunan sistem manusia.

Topik lingkungan semakin sering muncul pada agenda internasional semakin meningkatnya jumlah penduduk maka aktivitas ekonomi dan sosial manusia berjalan terus dan mengancam kestabilan lingkungan, hingga muncul *Green Thought* atau yang bisa disebut juga politik hijau. *Green Thought* digunakan sebagai cara untuk berpikir yang sangat radikal tentang hubungan manusia dengan alam. *Green Thought* (politik hijau) menuntut perubahan mendasar dalam hal organisasi sosial-politik dan memberikan penghargaan bagi spesies non manusia yang secara singkat untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk masa depan. Karakteristik politik hijau adalah ekosentrisme sebuah penolakan terhadap pandangan Antroposentrisme ialah suatu pandangan yang meyakinkan bahwa manusia sebagai pusat alam semesta atau dapat dikatakan bahwa manusia yang paling eksklusif (Steans Pettiford, 2009: 377).

Dengan kata lain *Green Thought* mencoba mengemukakan pandangan yang menyeluruh terhadap hubungan manusia dengan ekosistem global, selain menolak pandangan antroposentris, *Green Thought* mempercayai bahwa intervensi yang dilakukan oleh manusia dapat menjadi ancaman yang membahayakan bagi seluruh spesies termasuk manusia dan termasuk alam

itu sendiri. *Green Thought* juga berasumsi bahwa para pemerhati lingkungan menekankan global diatas internasional, contohnya, nilai penting komunitas global sama diakuinya dengan hak dari komunitas lokal. Pemerhati lingkungan melihat kebiasaan-kebiasaan manusia masa kini yang beberapa tidak sejalan dengan non manusia dan pemerhati lingkungan melihat bahwa kebiasaan manusia zaman modern berdasarkan pandangan antroposentris yang merupakan penyebab utama dari krisis lingkungan hidup.(Salsabila & Nurwati, 2020)

1.6.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berasal dari Bahasa Inggris yang berarti *Sustainable Development*. Menurut laporan Brundtland dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dalam sektor ekonomi dan keadilan sosial. (Mutaqin et al., 2021)

Sutamihardja (2004) mendefinisikan pengertian pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang kebijakannya memungkinkan dapat terjadinya proses menggali sumber daya alam untuk memerangi suatu kemiskinan dan kebutuhan untuk mencegah terjadinya suatu degradasi lingkungan sangat perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Kemudian pembangunan berkelanjutan juga harus memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengejar suatu cita cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa adanya mengorbankan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berguna untuk memenuhi suatu kebutuhan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan sebuah kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi hidupnya. Pada dasarnya konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan suatu strategi dalam pembangunan yang bisa memberikan batasan pada lajunya pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya tetapi ambang batas ini tidak absolut (akurat) tetapi merupakan batas luwes (fleksibel) yang sangat tergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan suatu biosfer dalam menerima sebab akibat yang ditimbulkan oleh manusia.

Dalam pembangunan berkelanjutan peran kemajuan bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan suatu pembangunan di berbagai bidang, pembangunan ini juga merupakan proses sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian dalam pola suatu pembangunan sangat perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat terus menerus menunjang suatu kegiatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini sangat positif untuk perubahan sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Akan tetapi keberlanjutan ini baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah di mulai sejak zaman malthus pada tahun 1798 yang sangat mengkhawatirkan ketersediaan lahan di inggris akibat adanya ledakan penduduk yang sangat pesat. Kemudian satu tengah abad perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin sangat mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan suatu publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow Et al.,1972).

Dari sisi Ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang, kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*).

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya, dan kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Dari uraian para ahli diatas maka pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan yang meliputi lahan, kota, masyarakat, bisnis, dan sebagainya yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun pada masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan sosial.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konsep yang digunakan sebagai cara dalam menentukan ruang lingkup masalah yang akan dijadikan sebagai variabel dalam proses penelitian. Definisi konseptual ini akan digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan penelitian di lapangan, sehingga hal ini akan memudahkan peneliti memahami dan mengkontekstualisasikan teori yang akan digunakan. Oleh karena itu, maka ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang diteliti, diantaranya

1.7.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah. Sedangkan, menurut Anderson kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah. Efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia.

1.7.2 Teori Politik Lingkungan

Politik Lingkungan merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara

lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Ilmuwan lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem.

1.7.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang memiliki perspektif jangka panjang, idealnya pembangunan keberlanjutan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kegiatan yang secara sistematis dan terencana dalam kerangka (2005) peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan tanpa mengurangi akses dan kesempatan generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu bagian yang mempunyai fungsi untuk membatasi dan memperjelas tujuan dari sebuah masalah. Menurut Singarimbun (1997), definisi operasional merupakan suatu unsur penelitian sebagai petunjuk mengenai bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing- masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata- kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Dalam hal ini peneliti akan memasukan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Tabel Kerangka Teori Penelitian

Kerangka Teori	Variable	Indikator

Kebijakan Publik	Dampak kebijakan pemindahan IKN	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata kelola pemerintahan b. Dampak dari kebijakan pemindahan IKN bagi masyarakat c. Keberlanjutan perekonomian bagi masyarakat d. Dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi
Teori Politik Lingkungan	Dampak Ekologi dan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati b. Pencemaran ekosistem dan udara c. Dampak bencana yang ditimbulkan dari pemindahan IKN
Pembangunan Berkelanjutan	Dampak pembangunan IKN di masa mendatang	<ul style="list-style-type: none"> a. Konflik Sosial Budaya b. Perbedaan Perspektif mengenai pemindahan IKN

		<p>c. Ketimpangan sosial antara masyarakat sipil dan pemerintah akibat pembangunan</p> <p>d. Dampak yang ditimbulkan dari pemindahan IKN bagi masyarakat</p> <p>e. Dampak ekonomi bagi masa depan Indonesia akibat dari pemindahan IKN</p>
--	--	--

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil yang akan dicapai. Creswell, J. W mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundametal bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (Hatuwe et al., 2021)

Metode kualitatif ini digunakan untuk mencari dan menjelaskan bagaimana situasi langsung yang ada di lapangan dengan mensurvei dan wawancara kepada narasumber untuk mempermudah dalam hal penyampaianya. Dalam kerangka teori yang dikemukakan diatas, penelitian ini dirancang untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam serta menyeluruh mengenai hubungan yang mempengaruhi. Keterkaitan antara variabel dari penelitian terdahulu juga turut membantu dalam menentukan tujuan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan menjabarkan data deskriptif sebagai instrumen dalam menjawab permasalahan penelitian. (Sugiyono, 2012: 014).

1.9.2 Jenis Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua jenis data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh merupakan hasil informasi yang didapatkan dan dihubungkan dengan penelitian yang diangkat :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat melalui informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dengan observasi atau pengamatan langsung di Penajam Paser Utara atau calon Ibu Kota Negara untuk menganalisa kenyataan lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi, survei, atau eksperimen yang telah dijalankan oleh orang lain atau untuk penelitian lain akan tetapi kita pergunakan dalam arti

penelitian. Data ini dapat diakses dalam bentuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi pemerintah, sensus, catatan internal organisasi, buku, artikel jurnal, situs web dan laporan, dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Alasan dan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini karena peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Penajam Paser Utara dalam menanggapi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser utara dan peneliti juga bertujuan mengetahui bagaimana persiapan Pemerintah Penajam Paser Utara dalam Mempersiapkan Ibu Kota Baru.

1.9.4 Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek dari penelitian tersebut (Hamidi,2005: 75-76). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Unit analisis data dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, pada suatu penelitian menentukan suatu unit analisis yang diperlukan. Melihat penjelasan yang diutarakan di atas maka unit analisis pada penelitian ini yaitu Pemerintah Penajam Paser utara dan masyarakat Penajam Paser Utara.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian data dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan atas data tersebut, maka hipotesis dicarikan data lagi secara berulang-ulang. Terakhir dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori:

1) Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan isi data.

2) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

3) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Proses penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4) Conclusion drawing/verification

Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan, ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian agar data yang diperoleh mudah untuk dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak- pihak terkait. Pelaksanaan di lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut :

A. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara (interview), Menurut Nasution (2016) wawancara adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada mengenai apa yang dirasakan dan diikrarkan narasumber melalui tanya jawab secara langsung. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemerintah terkait yaitu pihak Dinas Pekerjaan umum dan Dinas Tata Ruang Penajam Paser Utara dan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Sepaku yang merupakan kawasan inti IKN.

B. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna menyimpan informasi dan digunakan sebagai bukti valid bahwasannya penelitian ini benar-benar dilakukan di daerah Penajam Paser Utara, dokumentasi sendiri berupa foto, video dan juga rekaman wawancara

C. Observasi

Observasi yakni merupakan studi yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, sistematis juga terencana sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan cara mengamati dan mencatat seluruh

kejadian dan peristiwa yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian. Kemudian hasil dari observasi ilmiah ini, dijelaskan dengan teliti, tepat dan akurat, tidak ditambah atau dikurangi maupun dibuat-buat sesuai keinginan peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendatangi dan mengamati daerah Penajam Paser Utara, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami lebih jelas dan mendapatkan keterangan yang banyak.